

RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DAN KEPOLISIAN NEGARA RI**

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2015-2016 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat ke | : |
| Sifat | : Terbuka |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja Komisi III DPR RI |
| Hari/tanggal | : Selasa, 21 Juni 2016 |
| Waktu | : Pukul 10.30 s.d. 12.40 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi III DPR RI |
| Acara | : Pembahasan RKA K/L dan RKP Tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM RI dan Polri. |

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kepolisian Negara RI dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Yth. H Bambang Soesatyo, SE., MBA dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Rapat Kerja dengan Kapolri, diwakili oleh Asrena Polri, dalam pembahasan RKA K/L dan RKP Tahun 2017, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pagu Indikatif Polri T.A. 2017.

Guna terselenggaranya program dan kegiatan sesuai sasaran prioritas dalam Renja Polri Tahun 2017, Polri telah mengusulkan kebutuhan pagu indikatif dalam RAPBN TA. 2017 sebesar Rp. 110,752 triliun, namun sesuai dengan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA 2017, telah ditetapkan pagu indikatif Polri sebesar Rp. 72,573 triliun terpenuhi 65,53% dari usulan, dan apabila dibandingkan dengan APBN Polri TA. 2016 sebesar Rp. 73,002

triliun, secara umum berkurang sebesar Rp. 429,362 miliar atau 0,59%. Adapun komposisi pagu indikatif Polri TA 2017 perjenis belanja dan per sumber anggaran sebagai berikut :

1. Jenis Belanja Terdiri Dari:
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 43,250 Triliun (59,59%);
 - b. Belanja Barang : Rp.20,305 Triliun (27,97%);
 - c. Belanja Modal : Rp.9,017 Triliun (12,42%).
2. Sumber Anggaran Terdiri Dari:
 - a. Rupiah Murni : Rp.60,182 Triliun (82,92%);
 - b. PNBPN : Rp.7,840 Triliun (10,80%);
 - c. Badan Layanan Umum : Rp.1,122 Triliun (1,54%);
 - d. Pinjaman Luar Negeri : Rp.2,580 Triliun (3,55%);
 - e. Rupiah Murni Pendamping : Rp.247 Miliar (0,34%);
 - f. Pinjaman Dalam Negeri : Rp.600 Miliar (0,82%).

Dengan memperhatikan Sasaran Program Prioritas Pada RKP Tahun 2017 dan Renja Polri Tahun 2017, maka Pagu Indikatif Polri T.A. 2017 dijabarkan ke dalam 13 Yang Dilaksanakan Oleh 1.254 Satuan Kerja Di Lingkungan Polri dengan rincian masing-Masing program Sebagai Berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri Sebesar Rp.37,827 Triliun,
 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Polri Sebesar Rp. 16,600 Triliun,
 3. Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Sebesar Rp.385,203 Miliar;
 4. Program Litbang Polri Sebesar Rp. 6,956 Miliar,
 5. Program Pendidikan Dan Latihan Aparatur Polri Sebesar Rp.1,194 Miliar,
 6. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri Sebesar Rp. 426,583 Miliar,
 7. Program Pengembangan Strategi Keamanan Dan Ketertiban Sebesar Rp.1,116 Triliun,
 8. Program Kerjasama Keamanan Dan Ketertiban Sebesar Rp. 108,305 Miliar,
 9. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Sebesar Rp.1,027 Triliun,
 10. Program Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Sebesar Rp.8,864 Triliun,
 11. Program Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Sebesar Rp. 2,669 Triliun,
 12. Program Penanggulangan Gangguan Kamdagri Berkadar Tinggi Sebesar Rp.2,303 Triliun,
 13. Program Pengembangan Hukum Kepolisian Sebesar Rp.31,659 Miliar.
- Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, penetapan Pagu Indikatif Polri T.A. 2017 secara umum masih kurang, untuk pemenuhan kebutuhan sasaran prioritas sesuai rencana kerja Polri T.A. 2017 masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 23,988 triliun dan apabila memungkinkan mohon

dukungan untuk Polri agar dapat diberikan tambahan anggaran pada penetapan pagu anggaran TA. 2017 dengan rincian :

1. Untuk Pembayaran Gaji, Tunjangan Dan Remunerasi (Tunjangan Kinerja) Sebesar Rp. 5,042 Triliun;
2. Untuk Meningkatkan Dukungan Operasional Kegiatan Operasional Perkantoran Dan Meningkatkan Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Teknis Kepolisian Sebesar Rp. 3,788 Triliun;
3. Untuk Pembangunan Fasilitas Dan Pengadaan Peralatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik, Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Penegakkan Hukum, Penanganan Gejolak Sosial Dan Penanganan *Flash Point* Sebesar Rp. 15,166 Triliun.

B. Kendala Dalam Bidang Anggaran

Hambatan Polri lainnya adalah terkait dengan anggaran Polri saat ini yang masih belum ideal. pada tahun 2014 anggaran Polri sebesar rp 43,603 trilyun dengan komposisi: belanja pegawai 67,18%, belanja barang 22,27%, dan belanja modal 10,56%. pada tahun 2015 sebesar Rp. 57,100 trilyun dengan komposisi: belanja pegawai 56,02%, belanja barang 23,59%, dan belanja modal 20,40%.

Berdasarkan gambaran tersebut, komposisi anggaran Polri masih belum proporsional dimana selama 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Polri rata-rata terserap untuk belanja pegawai sebesar \pm 58%. kondisi tersebut berpengaruh pada potret kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya, karena masih minimnya dukungan anggaran operasional (belanja barang) dan terbatasnya dukungan peralatan (belanja modal). oleh karenanya, diharapkan komposisi anggaran Polri pada tahun 2016 dapat mendekati komposisi anggaran ideal (belanja pegawai 40%, belanja modal 30%, dan belanja barang 30%).

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI mewakili Menteri Hukum dan HAM, dalam pembahasan RKA K/L dan RKP Tahun 2017, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

➤ Pagu Indikatif Kementerian Hukum Dan HAM TA 2017

Sesuai dengan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 hal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA 2017, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM TA 2017 sejumlah Rp.10.069.592.802.000,-

- #### ➤ Sumber dana Anggaran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 berasal dari :
- | | |
|----------------|-----------------------------|
| · Rupiah Murni | = Rp. 7.559.113.443.000,- |
| · PNBP | = Rp. 2.510.479.359.000,- |
| Jumlah | = Rp. 10. 069.592.802.000,- |

| No | Jenis Belanja | Pagu Indikatif 2017 | |
|----|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | Rp | 4.620.635.553.000 |
| 2 | Belanja Operasional | Rp | 1.034.182.344.000 |
| 3 | Belanja Non Operasional (005) | Rp | 1.022.528.250.000 |
| 4 | Belanja Barang Non Operasional | Rp | 881.767.255.000 |
| 5 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Rp | 2.510.479.400.000 |
| | Jumlah | Rp | 10.069.592.802.000 |

➤ Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM Ta 2017 Per Program :

| PROGRAM | TOTAL |
|---|----------------|
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM | 2.597.577.378 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM | 24.114.928 |
| Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM | 37.442.406 |
| Administrasi Hukum Umum | 652.161.026 |
| Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan | 3.708.504.662 |
| Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian | 2.507.253.048 |
| Pembinaan / Penyelenggaraan HKI | 177.459.837 |
| Pembentukan Hukum | 58.758.847 |
| Pemajuan HAM | 42.086.725 |
| Pembinaan Hukum Nasional | 107.460.286 |
| Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM | 31.575.359 |
| Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM | 125.198.300 |
| Total | 10.069.592.802 |

- Mendapatkan tambahan belanja untuk kebutuhan mendesak sejumlah Rp.1.300.000.000.000,-
- Mengajukan usulan rencana kerja Pagu Indikatif T.A 2017 sejumlah Rp.13.020.462.760.000,-

3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Anggaran Polri belum mencukupi sehingga harus diperhatikan sasaran prioritas Polri. Bahwa Polri masih kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi deteksi intelijen masih sangat kurang sebagai contoh aktifitas separatisme dan terorisme.
 - Secara umum usulan kedua mitra sudah baik dan memenuhi harapan. Untuk tahun 2017, sedapat mungkin memperhatikan kecanggihan IT yang semakin maju.
 - Menyoroti masalah imigrasi, terutama terkait dengan pelayanan, yakni keberadaan kantor, oleh karena itu harus dianggarkan untuk pembangunan kantor.
 - Penambahan anggaran Kementerian Hukum dan HAM difokuskan untuk mengatasi over Kapasitas Lapas di Aceh, dan untuk pembangunan Lapas tersebut sudah tersedia lokasi/tanah.
 - Meminta kepada Polri untuk memperhatikan dapil Maluku, termasuk masalah penganggaran untuk Polda Maluku
 - Bahwa pada dasarnya mendukung usulan yang disampaikan mitra kerja, dalam kesempatan ini, mengingatkan kepada Sekjen Kementerian Hukum dan HAM untuk memperhatikan Lapas Solo
 - Mencermati anggaran dari Kepolisian selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan apa yang disampaikan ini sudah cukup baik. Meminta kepada Asrena untuk memperhatikan fasilitas anggota Kepolisian termasuk perumahan.
 - Di Aceh, ada 2 kabupaten yang belum memiliki Polres, yaitu Subulussalam dan Pidie Jaya. Mohon diperhatikan Polri karena sudah lama diusulkan.
 - Mohon penjelasan mengapa postur anggaran Polri di 2017 semakin menjauh dari postur ideal.
 - Di Kumham, dari postur penggunaan anggaran PNPB, terlihat ada bagian/direktorat yang terlalu besar anggarannya, sebaiknya kedepan bisa lebih merata dan proporsional.
 - Secara umum setuju dengan yang diajukan oleh mitra kerja, Polri kedepan harus konsen pemberantasan narkoba dan terorisme, mengingat kedua permasalahan ini semakin berdampak luas.
 - Penambahan fasilitas Polri perlu diklasifikasi untuk menentukan prioritas.
 - Meminta perhatian kepada Sekjen Kementerian Hukum dan HAM terhadap banyak perda-perda yang dibatalkan, bagaimana pengawasan terhadap perda-perda tersebut.
4. Beberapa penjelasan tambahan yang disampaikan Asrena Polri dan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Asrena Polri menjelaskan bahwa APBN 2017 tidak dialokasikan untuk anggaran Pilkada serentak, dan untuk Pilkada Serentak seluruh Indonesia dibentuk Satgas Pusat. Untuk Satgas Pusat anggarannya dari APBN. Sehubungan dengan potensi dan gangguan keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, Polri butuh kerjasama dan masukan berbagai pihak.

- Terkait narkoba dan terorisme, Polri sangat fokus dalam pemberantasannya, termasuk koordinasi dengan BNN dan BNPT. Untuk pelanggaran HAM, tugas Polri harus dikawal dari tindakan preventif hingga tindakan represif.
- Peningkatan anggaran dari tahun ke tahun berdasarkan renstra Polri 5 tahunan. Terkait rusunawa diharapkan anggarannya ditingkatkan. Pinjaman luar negeri ataupun hibah tidak ada yang direncanakan.
- Sekjen Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa guna efektifitas program, Kemenkumham berharap usulan Rencana Kerja Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM TA sejumlah Rp. 13.020.462.760.000,- tersebut mendapatkan persetujuan dari DPR, sesuai dengan rencana awal.
- Terkait persoalan budaya hukum, Kemenkumham sudah mengagendakan kegiatan-kegiatan tersebut di Lapas. Terkait imigrasi, sementara dibuat program pengawasan orang asing. Tahun 2017, pembangunan kantor Imigrasi akan menjadi perhatian meskipun anggaran terbatas.
- Terkait Lapas Solo jumlah kapasitas hunian sekitar 600an orang, sudah dalam proses pemindahan. Kemudian, terkait lahan Banda Aceh akan menjadi atensi Kemenkumham.
- Bahwa terkait dengan UU No. 20 tahun 1997, Pemerintah telah mengajukan untuk dilakukan revisi sehingga tidak ada lagi bidang/dirjen yang dianggap terlalu besar.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kepolisian Negara RI mengambil keputusan/kesimpulan, sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan :
 - a. Asrena Polri terkait Rencana Kerja dan pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp 72.573.554.162.000,- beserta usulan tambahan sebesar Rp. 23.988.000.000.000.-
 - b. Sekjen Kementerian Hukum dan HAM terkait Rencana Kerja dan pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp 10.069.592.802.000,-.
2. Komisi III DPR RI meminta kepada Sekjen Kemenkumham dan Asrena Polri untuk memperhatikan saran / masukan yang telah disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI, serta ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan pada rincian program masing-masing unit organisasi.
3. Komisi III DPR RI akan memproses penjelasan anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM serta Polri, untuk diperjuangkan di dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, dan selanjutnya akan diputuskan dalam rapat Pleno Komisi III DPR RI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI.

untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno Komisi III DPR RI yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI dan UU MD3.

Rapat ditutup pukul 12.40 WIB